

Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Anggel Dwi Satria^{1*}, Ridwansyah²⁾, Ahmad Habibi³⁾

¹Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Email korespondensi: angel.dwiisatria@gmail.com

Abstract

Based on Presidential Regulation Number 63 of 2020 concerning the Determination of Underdeveloped Regions for 2020-2024, the Pesisir Barat Regency is included in the underdeveloped category in Lampung Province. One of these lags can be seen from the community's economy. Economic growth is one indicator in measuring economic development in a region or country. According to data obtained from the BPS for Pesisir Barat Regency during the period 2013-2020, the economic growth of Pesisir Barat Regency tends to fluctuate. This growth cannot be separated from the role of each economic sector. Therefore, it is necessary to examine 17 economic sectors according to business fields to find out what economic sectors have the potential or advantages to become basic sectors and non-base sectors. The basic sector is the sector that forms the backbone of the local economy because it has a competitive advantage, and the non-base sector is the sector that supports local consumption needs. The formulation of the problem in this study is whether the basic and non-base sectors partially have a significant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency? Does the base and non-base sectors simultaneously affect economic growth in Pesisir Barat Regency? And what is the view of Islamic Economics on the influence of the base and non-base sectors on economic growth in Pesisir Barat Regency? This study is a quantitative study with secondary data published by the Central Statistics Agency in the 2013-2020 observation period. The type of research is library research. The data analysis technique used is Location Quotient (LQ), Klassen Typology, and Multiple Linear Regression Analysis processed with the Eviews-9 program. Based on the results of data processing, it shows that the base sector variable has a positive and insignificant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency. Then the non-base sector variable has a positive and insignificant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency. And the base sector and non-base sector variables simultaneously have a positive and significant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency, because the probability value is 0.002421 which means the prob value is less than ($0.002421 < 0.05$) so H_0 is rejected, with an effect of 87.4 %. It can be concluded that the basic sector partially has a positive and insignificant effect on economic growth, as well as the non-base sector partially also has a positive and insignificant effect on economic growth. While the base sector and non-base sector simultaneously or together have a positive and significant influence. In this case, it means that if the base sector and non-base sector are increased, it will affect the economic growth in Pesisir Barat Regency to increase. In the view of Islamic economics that Allah SWT commands humans as caliphs on earth to utilize natural resources as they should by not prioritizing the interests of a few humans, but all creatures on earth. With this research, it is expected to be able to promote, maintain, utilize the basic sector and the non-base sector in accordance with Islamic teachings for the welfare of the community to achieve the goal of *falah*.

Keywords: Base sector, non-based sector, economic growth

Saran sitasi: Satria, A. D., Ridwansyah., & Habibi, A. (2023). Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1213-1226. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7995>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7995>

1. PENDAHULUAN

Ketertinggalan pembangunan disuatu daerah harus mendapat perhatian yang serius, disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya

tekanan kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi, angka melek huruf serta kurangnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan timbulnya sejumlah

akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan (M.J Kasiyanto,1991).

Seperti dikatakan Kwik Kian Gie dalam tulisan Lesna Wanita, akibat dari situasi krisis dan kemiskinan yang tidak segera tertangani antara lain adalah : (1) tingginya beban sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang (Lesna Wanita, 2011).

Daerah tertinggal yaitu daerah kabupaten yang wilayah atau masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah yang secara umum memiliki karakteristik di bawah standar, dapat dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, infrastruktur dan akses layanan dasar yang belum memenuhi kualitas nasional, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Berdasarkan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas, dan (6) karakteristik daerah (Rizal Muttaqin, 2018) Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya dimana tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, 2019) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi satu-satunya wilayah yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan

diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas kurang lebih 2.907,23 km² atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 km (daratan dan garis pulau-pulau) termasuk salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta garis pantai daratan 210 km dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.

Tabel 1.

Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Persentase Kemiskinan
2013	5,54	58,95	-
2014	5,1	59,76	-
2015	4,94	60,55	15,81
2016	5,3	61,50	15,91
2017	5,33	62,20	15,61
2018	5,33	62,96	14,98
2019	5,37	63,79	14,48
2020	-1,17	63,91	14,29

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat (data diolah)

Dari data di atas terlihat bahwa capaian pembangunan selama 8 tahun terakhir Kabupaten Pesisir Barat masih jauh dari target yang telah ditentukan pada tahun 2019. Sesuai dengan Buku II dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sasaran strategis nasional yang akan dicapai pada pelaksanaan PPDT di tahun 2019 yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24%, (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,00%, (3) meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,59%, dan (4) berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 kabupaten tertinggal (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, 2019)

Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat terutama jalan, sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Rendahnya tingkat kemantapan jalan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kelas jalan yang dilalui, akibatnya jalur lalu lintas menjadi terhambat. Sejak tahun 2014 kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat selalu mengalami perubahan, tercatat kondisi jalan di tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2019

No	Kondisi Jalan	Tahun	
		2014	2019
1	Baik (km)	80,35	160,455
2	Rusak Ringan (km)	45,00	58,596
3	Rusak Sedang (km)	56,95	88,183
4	Rusak Berat (km)	206,5	338,847

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Barat (data diolah)

Berdasarkan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki target anggaran pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 865,11 miliar rupiah. Dari nominal tersebut berhasil terealisasi sebesar 831,57 miliar rupiah. Pendapatan daerah tersebut utamanya bersumber dari Dana Perimbangan yang berhasil direalisasikan sebesar 587,65 miliar rupiah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Tabel 3

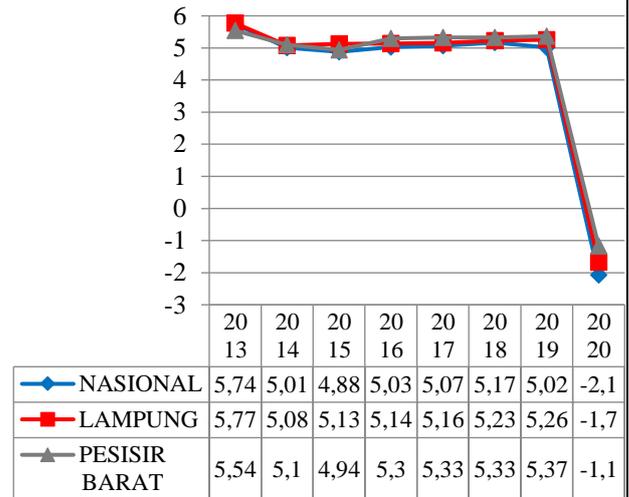
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Miliar Rupiah) 2019

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Miliar Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36,25	29,32
2	Dana Perimbangan	599,71	587,65
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	229,14	214,59
Jumlah Pendapatan Daerah		865,11	831,57

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara positif, maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian secara keseluruhan baik. Komponen pertumbuhan ekonomi terdiri dari sektor-sektor ekonomi unggulan produktif yang menjadi ukuran. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengetahui PDB t-1 (tahun sebelum tahun referensi) dibagi dengan PDB t-1 dan kemudian dikalikan 100%. Dalam skala regional, PDB juga disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI



Gambar 1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesisir Barat (%)

Sumber: BPS (Data diolah)

Dilihat dari grafik di atas pertumbuhan ekonomi Nasional cenderung fluktuatif, pada tahun 2013 pertumbuhan nasional mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 5,74%. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan kenaikan, hingga mengalami titik terendah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07%. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,69% dari tahun sebelumnya lalu secara perlahan mengalami nilai positif dengan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga persentase laju pertumbuhannya sebesar -1,67%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2013 mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 5,54%. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami turun naik, hingga mengalami titik terendah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,17%.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dipengaruhi oleh faktor penggerak perekonomian di daerah tersebut. Dimana setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kebijakan pengelolaan terkait. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran masing-masing sektor perekonomian. Besar kecilnya pendapatan setiap sektor perekonomian merupakan hasil perencanaan dan pertumbuhan di daerah tersebut. Semakin besar kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB

daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Dalam pandangnya, PDRB dialokasikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu wilayah, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak terpengaruh oleh perubahan harga.

Peningkatan nilai PDRB tidak terlepas dari kontribusi tujuh belas sektor lapangan usaha. Apabila sektor-sektor perekonomian yang dimiliki daerah dikelola dengan baik dan optimal, maka sektor

tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Pesisir Barat. Jika sektor ekonomi berkembang dengan baik, maka dapat menjadi sektor basis maupun sektor non basis di daerah.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat secara lebih rinci sektor-sektor yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat berikut ini:

Tabel 4

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2020 (Dalam Persentase)

PDRB (17 Kategori)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	4,48	4,63	4,84	3,15	2,99	1,39	0,01
B. Pertambangan dan Penggalian	8,49	6,18	10,5	6,47	9,97	7,66	5,75	-2,49
C. Industri Pengolahan	6,43	4,33	5,53	4,71	2,21	1,54	-1,32	-12,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,92	48,6	27,7	20,2	27,1	17,6	26,6	5,08
E. Pengadaan Air	2,32	6,27	0	0	0	6,59	1,71	5,02
F. Konstruksi	4,42	4,48	1,76	14,6	14,4	13,9	28,5	-2,03
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	6,25	4,98	2,03	2,27	7,01	7,86	9,41	-3,95
H. Transportasi dan Pergudangan	8,45	8,4	14,4	7,87	6,79	6,45	7,5	-4,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,6	9,55	10,6	5,68	10	9,81	10,3	-4,59
J. Informasi dan Komunikasi	8,02	7,11	8,62	16,4	11,8	8,64	5,75	8,68
K. Jasa Keuangan	3,49	3,36	0,7	4,2	3,91	2,24	2,98	0,29
L. Real Estate	7,8	6,65	6,19	5,42	7,24	6,15	6,25	-3,8
M,N. Jasa Perusahaan	13,7	13,5	7,74	3,29	7	3,87	8,47	-1,81
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	4,13	5,9	5,29	4,55	6,9	8,83	8,53	1,34
P. Jasa Pendidikan	8,72	9,26	7,66	4,32	5,2	8,94	8,51	4,09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	8,5	7,65	5,82	5,79	8,2	8,6	9,53
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,89	4,61	8,3	3,36	12,5	9,96	8,2	-4,49
Laju Pertumbuhan PDRB	5,54	5,1	4,94	5,3	5,33	5,33	5,37	-1,17

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat (data diolah)

Dilihat dari tabel di atas persentase laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan dan saat kenaikan tidak signifikan, pada tahun 2013 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 13,7% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada sektor pengadaan air yaitu sebesar 2,32%. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 48,6% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada jasa keuangan yaitu sebesar 3,36%. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 27,7% dan laju pertumbuhan

sektor terendah pada sektor pengadaan air yaitu sebesar 0% dalam hal ini sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 20,2% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada sektor pengadaan air yaitu sebesar 0%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 27,1% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada sektor pengadaan air yaitu sebesar 0%. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 17,6% dan laju pertumbuhan sektor terendah

pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 1,54%. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi yaitu sebesar 28,5% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar -1,32%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,53% dan laju pertumbuhan sektor terendah pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar -12,56%.

Pertumbuhan dari banyak sektor ekonomi dapat mendukung satu sama lain. Melihat perkembangan masing-masing sektor ekonomi dari laju pertumbuhan tersebut yang mengalami pasang surut, maka perlu dikaji sektor mana yang mempunyai potensi atau keunggulan untuk menjadi sektor basis dan sektor non basis yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat. Mengetahui dan memahami efektivitas sektor basis dan sektor non basis dalam pembangunan, pemerintah daerah dapat memutuskan berbagai kebijakan pembangunan terutama yang terkait dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas di sektor ekonomi basis dan memberikan gambaran implementasi kebijakan bagi pemerintah daerah agar lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan teori pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth*) yang dikemukakan oleh Hirschman, pembangunan ekonomi diprioritaskan kepada sektor-sektor ekonomi yang strategis atau yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi, dengan tidak mengabaikan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor ekonomi lainnya (ML Jhingan, 2010) Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya diarahkan atau diprioritaskan kepada sektor yang menjadi unggulan atau andalan (*leading sector*) pada perekonomian daerah tersebut.

Oleh karena itu, dengan pengembangan sektor basis dan sektor non basis maka sektor ekonomi yang memiliki prospek tersebut dapat dijadikan tulang punggung atau andalan sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Daerah Tertinggal

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah (Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal) Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal juga pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam atau rawan bencana alam.

2.2. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (www.ditjenpdt.kemendes.go.id). Teori basis yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Lincoln Arsyad, 1999). Sehingga dalam memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi wilayahnya. Dalam buku Rustiadi dkk menyatakan bahwa dalam suatu daerah, sektor ekonomi dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis dimana perbedaannya terletak pada kelebihan dan kekurangan dalam proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah (Ernan Rustiadi), 2011).

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperlihatkan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan

produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil) (Robinson Tarigan, 2014). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu daerah dengan periode tertentu. Analisis tentang perencanaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya menggunakan PDRB sebagai data dan informasi yang mendasar.

2.4. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sadono Sukirno, 2015) Menurut Simon Kuznet pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (ML Jhingan, 2014).

3. METODE PENELITIAN

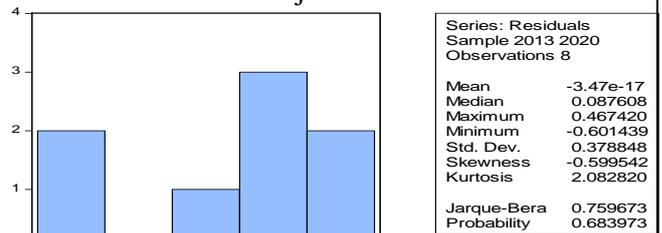
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif, Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah data sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha yang mana terdapat tujuh belas sektor ekonomi serta laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2012 berdirinya Kabupaten Pesisir Barat, yang telah dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung. Adapun Yang digunakan sebagai sampel adalah PDRB Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013-2020 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah tersedia yang didapat melalui instansi terkait yang dalam hal ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data diambil dari BPS Kabupaten Pesisir Barat adalah PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2013-2020. Sedangkan data yang diambil dari Provinsi Lampung adalah data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2013-2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan metode Jarque-Bera atau JB untuk menguji normalitas. Jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari 5% atau $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, tetapi jika Jarque-Bera kurang dari 5% atau $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Alat analisis yang digunakan untuk memvalidasi data berdistribusi normal atau tidak menggunakan pengiriman *e-views* 9. Hasil output dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas



Sumber : *E-Views* 9 (data sekunder diolah tahun 2021)

Dari hasil uji normalitas di atas didapatkan nilai dari *Jarque-Bera* adalah sebesar $0,759673 > 0,05$ berarti lebih dari 5% yaitu 75%. Dan dari data berikut juga dapat dilihat probability sebesar $0,683973$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan layak digunakan.

4.2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan metode *Variance Inflation Factor* atau VIF dalam penelitian ini. Penggunaan VIF untuk mendeteksi multikolinearitas dengan cara membandingkan nilai VIF yang diperoleh dengan angka 10. Jika VIF kurang dari 10 maka dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data. Berikut adalah hasil deteksi multikolinearitas menggunakan metode VIF:

Tabel 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/22/21 Time: 07:14
Sample: 2013 2020
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.127367	5.070950	NA
BASIS	0.078099	3.566455	1.374420
NONBASIS	0.080252	6.879596	1.374420

Sumber : *E-Views* 9 (data sekunder diolah tahun 2021)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang serupa antara variabel bebas sektor basis dan sektor non basis, yang berarti kedua variabel bebas memiliki korelasi yang kuat. Nilai dari pengujian ini adalah 1.374420 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut masih <10. Berdasarkan data tersebut, pengujian dengan menggunakan metode korelasi parsial antara variabel bebas menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model.

4.3. Uji Autokorelasi

Tidak adanya masalah autokorelasi merupakan asumsi OLS yang disebabkan oleh hubungan variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya dari waktu ke waktu. Dalam sebuah perekonomian ketika terjadi gejolak ekonomi atau kebijakan pemerintah maka diperlukan periode waktu untuk mempengaruhi sistem ekonomi tersebut, akibatnya variabel gangguan akan saling berhubungan antara waktu. Pada penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi digunakan uji LM. Dalam uji LM jika p-value obs square < 0,05 maka asumsi ditolak, jika nilai p-value obs square > 0,05 maka asumsi diterima dan model dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Atau nilai probabilitas c squares > 0,05 maka tidak terjadi

masalah autokorelasi. Hasil output autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.328876	Prob. F(2,3)	0.7428
Obs*R-squared	1.438594	Prob. Chi-Square(2)	0.4871

Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)

Dari hasil output di atas, hasil uji autokorelasi Breusch-Godfrey jika nilai probabilitas *Chi-Square* > α maka asumsi di terima, karena probabilitas *Chi-Square* = 0.4871 > 0,05 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka disimpulkan bahwa asumsi yang diperoleh tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau tidak konstan. Untuk membuktikan tidak adanya heteroskedastisitas atau lulus uji dapat dilakukan dengan uji white, dimana jika p-value *Obs*R-squared* < α maka *Ho* ditolak, jika p value **obs-squared* > 0,05 maka *Ho* diterima dan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dengan hasil output sebagai berikut:

Tabel 8

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.861708	Prob. F(5,2)	0.6145
Obs*R-squared	5.463755	Prob. Chi-Square(5)	0.3619
Scaled explained SS	1.155520	Prob. Chi-Square(5)	0.9491

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/22/21 Time: 07:20

Sample: 2013 2020

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.298137	0.318824	-0.935113	0.4484
BASIS^2	0.082294	0.235130	0.349993	0.7598
BASIS*NONBASIS	-0.277477	0.302124	-0.918423	0.4554
BASIS	0.477337	0.445743	1.070878	0.3963
NONBASIS^2	0.020698	0.182184	0.113610	0.9199
NONBASIS	0.192701	0.270579	0.712183	0.5502
R-squared	0.682969	Mean dependent var		0.125585
Adjusted R-squared	-0.109607	S.D. dependent var		0.139705
S.E. of regression	0.147162	Akaike info criterion		-0.880858
Sum squared resid	0.043313	Schwarz criterion		-0.821277
Log likelihood	9.523431	Hannan-Quinn criter.		-1.282709
F-statistic	0.861708	Durbin-Watson stat		1.970730
Prob(F-statistic)	0.614519			

Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)

Dilihat dari hasil nilai output p value *obs-squared > 0,05 maka Ho diterima, nilai yang dihasilkan 0.9491 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.5. Hasil Uji Hipotesis

4.5.1. Uji T (Uji Parsial)

Uji T (Uji Parsial) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial (secara

individual) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi di sektor basis dan non basis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika probabilitasnya lebih kecil dari alpha (<0,05), maka variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variable terikat, begitu pula sebaliknya.

Tabel 9

Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Method: Least Squares

Date: 10/22/21 Time: 07:12

Sample: 2013 2020

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.568062	0.764899	-0.742663	0.4911
BASIS	0.442687	0.230939	1.916901	0.1134
NONBASIS	0.313949	0.178959	1.754304	0.1397
R-squared	0.910129	Mean dependent var		4.467500
Adjusted R-squared	0.874180	S.D. dependent var		2.285055
S.E. of regression	0.810534	Akaike info criterion		2.697750
Sum squared resid	3.284830	Schwarz criterion		2.727541
Log likelihood	-7.791001	Hannan-Quinn criter.		2.496825
F-statistic	25.31754	Durbin-Watson stat		2.221539
Prob(F-statistic)	0.002421			

Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)

Dari hasil tabel output di atas, maka variabel X1 (sektor basis) yang diperoleh dari pengaruh parsial masing-masing sektor memiliki nilai koefisien sebesar 0,442687, nilai t-statistik sebesar 1,916901 dan nilai probabilitas sebesar 0,1134 > 0,05 maka Variabel X1 (sektor basis) Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (pertumbuhan ekonomi). Variabel X2 (sektor non basis) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,313949, nilai t-statistik sebesar 1,754304, dan nilai probabilitas 0,1397 > 0,05 sehingga untuk variabel X2 (sektor non basis) nilai Ho diterima dan ditolak sebagai Ha, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (pertumbuhan ekonomi).

4.5.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F adalah tingkat signifikan nilai F yang memungkinkan untuk melihat pengaruh simultan dari variabel prediktor terhadap variabel respons, apakah signifikan secara statistik atau tidak. Jika nilai p < 0,05 maka Ha diterima. Berdasarkan hasil output representasi e-views 9 pada tabel hasil pengujian regresi, dapat dilihat bahwa persamaan regresi linier

dengan nilai pertumbuhan ekonomi (Y), sektor basis (X1), sektor non-utama (X2) . Terlihat bahwa F-statistik 0,002421 < (0,05) = 0,002421 lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor basis dan sektor non basis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013-2020.

4.5.3. Koefisien Determinasi (R²)

Dari output pada tabel di atas dengan nilai R-Squared sebesar 0,874180 (87,4%) dalam hal ini dapat diketahui bahwa variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 87,4%, sehingga dapat diartikan bahwa sektor basis dan sektor non basis memiliki pengaruh simultan sebesar 87,4% terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 12,6% dari total pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model regresi.

4.6. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda. Regresi

berganda digunakan untuk memperkirakan pengaruh dua atau akumulasi variabel bebas terhadap satu variabel terikat ataupun guna meyakinkan terdapat tidaknya hubungan fungsional antara dua ataupun tambahan variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013-2020. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -0,568062 + 0,442687X_1 + 0,313949X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
a : Konstanta
b₁b₂ : Koefisien Regresi
X₁ : Sektor Basis
X₂ : Sektor Non Basis
e : Standar Error

Ukuran persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai konstanta (a) adalah -0,568062 yang artinya jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -0,568062%.
- Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda, koefisien regresi pada variabel sektor basis bernilai positif sebesar 0,442687 menunjukkan bahwa jika variabel sektor basis mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,442687%. Hasil perhitungan koefisien regresi bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara sektor basis dengan pertumbuhan ekonomi. Bila sektor basis semakin meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya bila sektor basis mengalami penurunan maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linier berganda, koefisien regresi variabel sektor non basis bernilai positif sebesar 0,313949 menunjukkan bahwa apabila variabel sektor non basis meningkat sebesar 1% maka variabel pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,313949%. Hasil perhitungan koefisien regresi

adalah positif berarti terdapat hubungan positif antara sektor non basis dengan pertumbuhan ekonomi. Bila sektor non basis tumbuh maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya bila sektor non basis menurun maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013-2020

Menurut Harry W. Richardson, sektor basis merupakan penentu utama perkembangan ekonomi disuatu wilayah yang berkaitan langsung dengan permintaan barang serta jasa dari luar wilayah. Dengan bertambahnya sektor basis di sesuatu daerah maka pendapatan wilayah tersebut akan meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan barang serta jasa yang dihasilkan. Keberadaan sektor basis bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas nilai signifikansi variabel sektor basis sebesar 0,1134 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan serta mempunyai nilai koefisien sebesar 0,442687 yang berarti tiap 1% peningkatan sektor basis akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 0,442687%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sektor basis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andy Pratama dan Ady Soejoto yang dalam penelitiannya menghasilkan sektor basis memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Yang artinya sektor basis dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang konstan, jika sektor basis meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dilihat dari teori nya sektor basis adalah sektor dimana kegiatan ekonominya melayani pasar di wilayah tertentu (dalam suatu wilayah) dan di luar (ekspor). Secara tidak langsung daerah memiliki kemampuan untuk mengeksport barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain atau ke luar daerah. Hal tersebut dikarenakan sektor ekspor memegang peranan penting dalam pertumbuhan daerah, sektor ekspor dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya bagi perekonomian daerah, tetapi juga bagi perekonomian nasional.

Tidak signifikannya pengaruh sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan karena kegiatan ekspor di Kabupaten Pesisir Barat sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah yang kurang kondusif, dimana kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai baik berupa jalan, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan ekspor barang dan jasa ke luar wilayah. Sesuai dengan penelitian Zenal Asikin dkk, hal ini dikarenakan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ekspor (Zenal Asikin dkk, 2016) Infrastruktur transportasi khususnya pelabuhan dan jalan sangat mendukung seluruh kegiatan ekonomi serta menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi suatu daerah seperti infrastruktur, bertujuan untuk memperkecil perbedaan antar wilayah dengan wilayah lainnya. Pengeluaran pemerintah akan bersifat elastis pada sektor publik karena semakin banyaknya pengeluaran pemerintah untuk publik akan berpengaruh terhadap banyaknya barang publik yang disediakan untuk masyarakat (Femei Purnamasari, 2017).

Dengan demikian, sektor basis di Kabupaten Pesisir Barat berpeluang untuk terus tumbuh serta berkembang dan bisa menjual produknya ke luar wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sektor basis di Kabupaten Pesisir Barat walaupun tidak signifikan tetapi memberikan dampak positif sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat bersamaan dengan peran sektor basis.

Pengaruh Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013-2020

Sektor non basis merupakan sektor yang menopang perekonomian wilayah serta penuhi kebutuhan lokal ataupun masyarakat, sedangkan sektor non basis bergantung pada tingkatan pendapatan masyarakat. Sebab dimaksudkan guna penuhi kebutuhan penduduk setempat, sehingga barang-barang tersebut tidak melampaui zona ekonomi masyarakat atau hanya di dalam zona ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pada tabel, terlihat bahwa nilai signifikansi variabel sektor non basis sebesar 0,1397 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,13970 > 05$) yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya hasil koefisien sebesar 0,313949 yang berarti tiap peningkatan 1% sektor non basis akan diiringi oleh

kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,313949%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sektor non basis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil tersebut menunjukkan sektor non basis berpengaruh positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat. Tidak signifikannya sektor non basis bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat disebabkan karena kurang optimalnya peranan sektor basis. Ketika aktivitas kegiatan basis menurun atau menurunnya permintaan barang dan jasa terhadap sektor basis, hal ini akan mempengaruhi pada kegiatan non basis. Karena sektor basis memainkan peran yang sangat penting dalam produksi barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, penjualan di luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Masuknya pendapatan dari luar mendorong pertumbuhan konsumen dan investasi di daerah tersebut. Ini akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga meningkatkan permintaan untuk sektor non basis (lokal). Peningkatan permintaan ini secara langsung akan berkontribusi pada kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan serta di industri lainnya. Dan karena sektor basis di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan hasil yang belum cukup optimal maka secara langsung berdampak pada kegiatan sektor non basis sehingga berkurangnya pendapatan ke dalam wilayah.

Alasan tidak signifikannya sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dapat juga disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat yang menyebabkan daya beli sektor ini masih rendah karena permintaan sektor non basis sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat di daerah setempat. Menurut teori Soekartawi pendapatan akan mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi, bahkan sering dijumpai dengan peningkatan pendapatan maka barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut akan meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak terhadap tingginya akan permintaan suatu barang.

Tabel 10
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	Kab. Pesisir Barat	Prov. Lampung
2013	Rp123.009,00	Rp22.770.676,00
2014	Rp16.186.787,00	Rp23.647.268,00
2014	Rp16.818.258,00	Rp24.581.783,00
2016	Rp17.546.288,00	Rp24.581.783,00
2017	Rp18.330.637,00	Rp26.614.816,00
2018	Rp19.159.038,00	Rp27.741.245,00
2019	Rp20.041.424,00	Rp28.935.180,00

Sumber: BPS Prov. Lampung

Berdasarkan data di atas, bisa dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Barat serta Provinsi Lampung senantiasa mengalami kenaikan. Selama periode tahun 2013-2019, pendapatan per kapita Kabupaten Pesisir Barat masih terletak di bawah pendapatan per kapita Provinsi Lampung. Perihal ini menunjukkan kalau secara makro, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Pesisir Barat masih terletak di bawah rata-rata Provinsi Lampung. PDRB perkapita mencerminkan pendapatan perkapita masyarakat di sesuatu daerah. Bila PDRB perkapita besar, maka bisa diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk di wilayah tersebut pula besar. Tingkatan pendapatan per kapita bisa memberikan efek terhadap daya beli masyarakat. Dengan besarnya tingkatan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan keuntungan dalam penjualan barang serta jasa yang implikasinya pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andy Pratama dan Ady Soejoto yang dalam penelitiannya menghasilkan kalau sektor non basis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan secara positif. Yang artinya sektor non basis dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang konstan, jika sektor non basis mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi pula akan meningkat.

Pengaruh Secara Simultan Sektor Basis dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat 2013-2020

Dengan hasil penelitian ini terkait sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013- 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan hasil output pengolahan data bahwa variabel independen (sektor basis dan sektor non

basis) memiliki signifikansi sebesar 0.002421 dengan tingkat probabilitas F-statistic harus lebih kecil dari 0.05, yang artinya nilai F-statistic lebih kecil dari 0.05 ($0.002421 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

- b. Berdasarkan pada hasil penelitian tabel 4.11 diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0.874180 artinya variabel sektor basis dan sektor non basis secara simultan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa sektor basis dan sektor non basis memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 87,4%, sedangkan sisanya 12,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang diteliti.

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sektor basis dan sektor non basis secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat. Artinya bila sektor basis dan sektor non basis meningkat maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Sektor basis Kabupaten Pesisir Barat memiliki delapan sektor ekonomi unggulan yang dapat melakukan kegiatan untuk penuhi kebutuhan wilayahnya dengan menciptakan produk ataupun penyedia jasa yang menghasilkan pendapatan dari luar daerah. Di sisi lain, sektor non basis di Kabupaten Pesisir Barat memiliki sembilan sektor ekonomi yang dapat melayani pasar daerah sendiri karena sanggup penuhi kebutuhan konsumsi lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Andy Pratama dan Ady Soejoto tentang “Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan” yang secara simultan sektor basis dan sektor non basis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan secara positif dan signifikan.

Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah untuk melaksanakan semua unit usaha dalam bidang sektor ekonomi maka di perlukannya pemasukan modal atau investasi kedalam daerah tersebut.

Dari kegiatan pemasukan modal atau investasi maka memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Di dalam perspektif ekonomi islam investasi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya berorientasi kepada persoalan duniawi saja, didalam islam hal ini memadukan anatra dua dimensi yaitu dunia dan akhirat.

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasi dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya. Hal ini dikarena dalam perekonomian islam semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan. Pada dasarnya investasi bentuk aktif dari sistem ekonomi islam dengan menekankan pada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi yaitu tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun dari cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Hal ini

telah dianjurkan oleh Allah SWT pada ayat al-Qur'an yang pada tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Investasi sebagai salah satu bahasan yang ada pada ilmu ekonomi, tentunya juga memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, juga dapat mengurangi pengangguran serta pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian investasi dalam islam lebih ditujukan untuk mendorong pada sektor riil, yaitu investasi yang ditanamkan secara langsung pada sektor usaha sehingga investasi pada sektor riil merupakan aktivitas yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi secara langsung, karena dapat meningkatkan perekonomian dalam perkembangan usaha yang berkaitan.

Dalam penelitian ini jumlah nilai PMDN dan PMA yang sangat berpengaruh positif dan signifikan yaitu PMDN, sedangkan PMA pada Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini dalam konteks Islam penanaman modal sesuai dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia dan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Tentunya hal ini akan berpacu kepada kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam prinsip Islam yang salah satunya adalah Khilafah yaitu peran pemerintah atau pemimpin untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan terhadap pihak manapun. Serta prinsip 'adl keadilan agar tidak ada yang zalim dan juga tidak ada yang merasa terzalimi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian "Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Periode Tahun 2013-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam" adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan uji signifikansi parsial uji t bahwa sektor basis diketahui memiliki nilai *coefficient*

sebesar 0,442687 yang berarti sektor basis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki nilai probabiliti sebesar $0,1134 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan, dengan demikian sektor basis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Adapun sektor non basis secara parsial juga berpengaruh positif tidak signifikan dengan nilai *coefficient* sebesar 0,313949 yang artinya sektor non basis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki nilai probabiliti sebesar $0,1397 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan.

- b. Berdasarkan hasil uji F (simultan) sektor basis dan sektor non basis secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan nilai F-Statistik sebesar 0.002421 < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan nilai determinasi sebesar 0.874180, dengan demikian sektor basis dan sektor non basis memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 87,4%.

6. REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L.D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- BPS, Katalog. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*.
- BPS Provinsi Lampung. (2019). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019*.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Huda, N., & dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Kasiyanto, M.J. (1991). *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasim Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. (2011). Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Rustiadi, E. (2009). *Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Pembangunan Dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soekartawi. (2012). *Faktor-Faktor Produksi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Stephen C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Ed. 9. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonomika Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UIL.
- Abdullah, Y. (2011). Sistem Pemikiran Islam Imam Al-Ghozali. *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2: 203–22.
- Asikin, Z., Daryanto, A., & Anggraeni, L. (2016). Pengaruh Infrastruktur Dan Kelembagaan Terhadap Kinerja Ekspor Agregat Dan Sektoral Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 13, no. 2 (2016): 145–56.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. (2017). *Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2018-2019*.
- Bafadal, A. (2014). Analisis Sektor Basis Pertanian Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah." *Jurnal AGRIPPLUS* 24, no. 2 (2014): 152–60.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.
- Borhan, J. T. (2008). Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam. *Jurnal Usuluddin*, 2008, 93–107.

- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal.
- Emillia, S., & Nurjannah, R. (2013). Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Basis Dan Non Basis Dalam Perekonomian Propinsi Jambi.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 1, no. 7.
- Firlianyhanifah, O. (2009). Pengaruh Variabel Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Beberapa Negara Muslim Tahun 2000-2004. UI.
- Iqbal. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1: 8–21.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 : 14–28.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 21, no. 1 : 62–72.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 : 117–22.
- Nadhira, G. H. (tt). Teori Pembangunan Ekonomi Yang Sesuai Untuk Indonesia.
- Nasir, M. (2015). Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumatera Utara. *Seminar Hasil Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan*.
- Paduli, Dony, Daisy S.M. Engka, & Kers, D. T. (2017). Analisis Potensi Sektoral Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17, no. 2.
- Pratama, A., & Soejoto, A. (2016). Pengaruh Sektor Basis Dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 : 1–6.
- Purnamasari, F. (2017). Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung). *Jurnal Manajemen Indonesia* 17, no. 1: 13-26.
- R. Jumiyanti, K. (2018). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review* 1, no. 1 : 29–43.
- Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 01: 329–45.
- Sapriadi & Hasbiullah. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 : 71–86.
- Sudirman, S., & M Alhudhori. (2018). Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 3, no. 1 : 94–107.
- Syofya, H. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Dalam Penguatan Daya Saing Kota Sungai Penuh. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* 7, no. 2 : 98–144.
- Tutupoho, A. (2019). Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Jurnal Ekonomi XIII*, no. 1.
- Wahid, A. (2006). Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study Kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor.
- Wanita, L. (2011). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011. *Jurnal Jom FISIP* 1, no. 2 : 1–10.